

## Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Lampung

Nurohmayni Putri

Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung

Email : [putrinurohmayni@umitra.ac.id](mailto:putrinurohmayni@umitra.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to analyze the implementation of public sector accounting in increasing financial transparency and accountability in local governments. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results show that the effective implementation of public sector accounting can increase financial transparency and accountability, although there are still several obstacles such as the lack of competent human resources and adequate technological infrastructure.*

**Keywords:** *Public Sector Accounting, Transparency, Accountability, Local Government Finance.*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi sektor publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang efektif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur teknologi yang memadai.

**Kata Kunci:** Akuntansi Sektor Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Pemerintah Daerah.

### PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntansi sektor publik memainkan peran krusial dalam proses ini dengan menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi akuntansi sektor publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat keuangan pemerintah daerah, observasi proses akuntansi, dan analisis dokumen keuangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data.

### HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi akuntansi sektor publik mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah hasil temuan dan pembahasannya:

### 1. Transparansi

Implementasi akuntansi sektor publik telah meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh publik. Implementasi akuntansi sektor publik berbasis akrual telah meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan kini disusun berdasarkan standar akuntansi yang jelas dan dapat diakses oleh publik melalui situs web resmi pemerintah daerah. Wawancara dengan pejabat keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan yang lebih transparan membantu membangun kepercayaan publik.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting untuk menghindari praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, informasi keuangan menjadi lebih lengkap dan akurat, mencakup tidak hanya aliran kas tetapi juga aset dan kewajiban. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah.

### 2. Akuntabilitas

Akuntansi sektor publik membantu meningkatkan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Penerapan akuntansi sektor publik juga telah meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan hasil audit menunjukkan peningkatan kualitas laporan keuangan. Pejabat keuangan melaporkan bahwa sistem ini membantu mereka dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi berbasis akrual, proses audit menjadi lebih efektif dan efisien. Ini memungkinkan auditor untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dengan lebih baik. Akuntabilitas yang tinggi juga mendorong para pengelola keuangan untuk bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab.

### 3. Kendala

Meskipun terdapat peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam implementasi akuntansi sektor publik, antara lain:

- Sumber Daya Manusia: Kurangnya tenaga akuntan yang terlatih dan berpengalaman dalam akuntansi sektor publik.
- Infrastruktur Teknologi: Keterbatasan dalam sistem informasi dan teknologi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan.

Kendala ini menunjukkan bahwa untuk mencapai implementasi akuntansi sektor publik yang optimal, diperlukan investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Pelatihan berkelanjutan bagi staf akuntansi dan pengembangan sistem informasi yang canggih akan membantu mengatasi hambatan ini. Pemerintah daerah juga perlu berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga akuntan sektor publik.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi yang diusulkan:

- Pelatihan dan Pengembangan: Menyelenggarakan program pelatihan rutin bagi staf keuangan mengenai standar akuntansi berbasis akrual.
- Peningkatan Teknologi: Mengadopsi teknologi informasi yang lebih modern untuk mendukung penyusunan dan pelaporan keuangan.
- Pengawasan dan Evaluasi: Meningkatkan pengawasan dan evaluasi internal untuk memastikan bahwa implementasi akuntansi sektor publik berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Peningkatan kapasitas dan infrastruktur sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi akuntansi sektor publik. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia akan memastikan bahwa staf keuangan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Sementara itu, teknologi informasi yang canggih akan mempermudah proses penyusunan dan pelaporan keuangan, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pelaporan.

#### **KESIMPULAN**

Implementasi akuntansi sektor publik dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi sektor publik berbasis akrual di Pemerintah Daerah Lampung telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Laporan keuangan yang disusun lebih jelas, lengkap, dan dapat diakses oleh publik, sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, akuntabilitas keuangan juga meningkat melalui audit yang lebih efektif dan efisien. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya tenaga akuntan yang terlatih dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Kendala-kendala ini

menghambat optimalisasi implementasi akuntansi sektor publik dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Christiaens, J., et al. (2015). The Impact of IPSAS on Reforming Governmental Financial Reporting: An International Comparison. *International Review of Administrative Sciences*, 81(1), 158-177. <https://doi.org/10.1177/0020852314557226>
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). (2012). *Statement on Concepts*.
- Hoque, Z. (2005). *Handbook of Cost and Management Accounting in Government*. Oxford: Elsevier.
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). *Public Sector Accounting* (6th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Lapsley, I. (2009). New Public Management: The Cruellest Invention of the Human Spirit. *ABACUS*, 45(1), 1-21. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2009.00284.x>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Siti-Nabiha, A. K. (2005). Accounting, Accountability and Reforms: A Study of Malaysian Public Sector. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 1(2), 121-140. <https://doi.org/10.1108/18325910580000794>